

## BAB II

### KELUARGA TRADISIONAL JEPANG (SISTEM *IE*) DITINJAU DARI PERJALANAN SEJARAH DAN BUDAYA

#### 2.1 Masyarakat Jepang Pada Masa Tokugawa

Pada masa pemerintahan keluarga Tokugawa (1603-1868) yang terdiri dari 14 generasi sepanjang 250 tahun, dikeluarkan kebijakan politik yang dikenal dengan politik *sakoku* (penutupan negara). *Sakoku* adalah kebijaksanaan politik yang dilakukan oleh Pemerintah Tokugawa untuk tidak melakukan hubungan dengan negara-negara asing dalam segala bidang kehidupan. Ekonomi pada era pemerintahan keluarga Tokugawa berlandaskan pada ekonomi agraris, yaitu menempatkan pertanian sebagai pusat kehidupan bangsa.

Jepang telah mengenal adanya stratifikasi sosial di dalam masyarakat sejak zaman pemerintah Tokugawa, tetapi sistem stratifikasi sosial tersebut baru ditetapkan secara resmi dan ketat pada masa pemerintah Keshogunan Tokugawa. Tataan masyarakat Tokugawa ditandai dengan adanya pemisahan kelas-kelas sosial yang sangat ketat. Sistem stratifikasi sosial ini bertahan dalam waktu yang cukup lama dan bahkan sampai sekarang memberi dampak pada sikap serta pemikiran dalam kehidupan bermasyarakat.

Stratifikasi tersebut membagi masyarakat Jepang menjadi empat kelas, yaitu *shi*, *no*, *ko*, dan *sho*. *Shi* adalah *bushi* (samurai dan keluarganya), *no* adalah *nomin* (keluarga petani), *ko* dari *kosakunin* (golongan pengrajin), dan *sho* dari *shonin* (golongan pedagang). Pembagian kelas ini didasarkan atas beberapa alasan, antara lain:

- a. Kelas *Samurai*, sebagai penguasa dianggap sudah sewajarnya memiliki status dan kedudukan sosial yang tinggi. Pada masa Sengoku, keturunan yang telah membunuh banyak orang dengan pedangnya disebut sebagai keturunan *bushi* dan yang telah membunuh beberapa puluh dan beberapa ratus orang adalah keturunan *hatamoto* dan keturunan *daimyo* sedangkan yang telah membunuh beribu-ribu orang tak terhitung disebut sebagai

keturunan *shogun*. Golongan *samurai* merupakan orang-orang yang telah membunuh dengan pedagangnya dalam berbagai kerusuhan dan merekalah yang menguasai negara. Golongan *samurai* mendominasi politik. Kebanyakan mereka bertempat tinggal di wilayah perkotaan atau *jokamachi* (kota benteng).

- b. Kelas *Nomin* merupakan kelas dari orang-orang yang menghasilkan sesuatu yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Jepang dan di anggap sebagai sumber negara. Oleh karena itu, kelas petani mempunyai kedudukan sosial yang cukup tinggi, yaitu satu tingkat dibawah kelas *samurai*. Namun, dalam realitas status mereka lebih rendah dari penduduk Jepang masa itu. Golongan petani ini dianggap sebagai kelas yang melayani kebutuhan ekonomi golongan penguasa.
- c. Kelas *Kosakunin*, menghasilkan sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat walaupun bukan kebutuhan pokok. Dengan alasan demikian, sewajarnya kelas ini memiliki kedudukan sosial dibawah kelas petani dalam urusan sistem stratifikasi masyarakat Jepang masa Edo. Meskipun tidak menghasilkan kebutuhan pokok, para pengrajin memiliki kemampuan untuk mengolah bahan-bahan yang dihasilkan oleh petani dan menjadi kebutuhan masyarakat. Kelas pengrajin dapat terbagi atas dua kelas, yaitu *goyo shokunin* bekerja dan melayani pesanan barang-barang yang dibutuhkan Pemerintah Pusat (*Bakufu*) ataupun Pemerintah Daerah (*Han*) yang berupa perlengkapan perang untuk kelas *samurai*, misalnya tameng atau pedang. Sebagai pengrajin yang selalu mendapat pesanan barang dari pemerintah, kelas *goyo shokunin* memperoleh rumah yang cukup besar serta tunjangan pensiun. Kelas yang kedua, *hira shokunin* yang merupakan pengrajin yang mengerjakan dan memenuhi pesanan masyarakat umum. Golongan pengrajin biasa membawahi satu tingkat golongan lagi, yaitu *desshokunin* (pekerja harian) yang bekerja berdasarkan pesanan.
- d. Kelas *Shonin* dianggap sebagai masyarakat yang tidak menghasilkan. Keuntungannya hanya diperoleh dari hasil karya orang lain. Hal ini dianggap sebagai pekerjaan rendah, misalnya menjual hasil pertanian yang dikerjakan oleh kelas petani atau memperoleh keuntungan dari hasil

penjualan barang yang sudah dihasilkan oleh pengrajin. Oleh karena itu, kelas pedagang ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah. Meskipun kelompok pedagang ini berbeda pada tingkat paling rendah dalam stratifikasi sosial masyarakat Jepang feodal, secara finansial kelompok pedagang memiliki kesempatan lebih banyak untuk menumpuk kekayaan. Para pedagang tidak dituntut untuk membayar pajak tinggi dibandingkan kelompok petani, karena pedagang hanya dituntut untuk membayar pajak dari sewa rumah dan untuk memperbaiki fasilitas umum yang ada di daerahnya. Sebaliknya, keluarga pedagang tidak seperti kelompok masyarakat lainnya, khususnya kelompok *samurai*. Mereka tidak mempunyai penghasilan tetap, tetapi bergantung dari ketrampilan berdagang untuk memperoleh uang dan juga menjaga pengeluaran yang dibutuhkan oleh seluruh anggota keluarga.

Dari keempat stratifikasi masyarakat ini, petani adalah masyarakat mayoritas. Keempat lapisan masyarakat menjalankan sistem kekerabatan yang disebut dengan sistem *Ie*. Sistem *Ie* ini pada awalnya dijalankan oleh masyarakat golongan bushi atau samurai saja. Kemudian sistem *Ie* diberlakukan pula pada lapisan masyarakat lainnya pada zaman Meiji yang dikukuhkan dalam undang-undang dasar Jepang atau Meiji Minpo. (Rebick& Takenaka, 2006)

Untuk menjaga jalannya stratifikasi sosial dalam masyarakat dan juga untuk dapat melaksanakan sistem perekonomian dengan baik, sistem *Ie* sebagai adat kebiasaan yang ada dalam masyarakat dijalankan dengan ketat, khususnya dalam masyarakat *samurai*. Kedudukan *shogun* akan digantikan oleh *chounan* dari keluarga Tokugawa. Demikian juga selanjutnya, keluarga *daimyo* sampai jabatan yang terendah dalam pemerintahan Tokugawa akan diteruskan berdasarkan garis patrilineal. Pedang dan jabatan pemerintahan merupakan harta warisan yang tidak dapat diserahkan kepada orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah langsung (*ketsuen kankei*) dan juga tidak dapat diperjualbelikan.

Perkawinan hanya dapat dilakukan antara orang-orang yang berada dalam kelas yang sama dan sependapat mungkin mempunyai kedudukan

yang sama. Seorang anak *daimyo* akan menikah dengan anak *daimyo* atau yang setingkat dengan *daimyo*. Sistem *Ie* mengatur perkawinan yang terjadi diantara anggota-anggota *Ie*-nya dalam rangka mempertahankan kedudukan dan nama baik *Ie*.

Hal semacam ini juga dituntut dari calon pengantin wanita, terutama yang akan menikah dengan *chounan* dari keluarga *samurai* kelas atas. Meskipun berasal dari keluarga *samurai*, perkawinan tetap harus dilaksanakan sesuai dengan tingkatan yang dimiliki oleh orang tersebut dalam masyarakat *samurai*. Dengan demikian, tidak akan terjadi perkawinan antara anak kelas *samurai* tingkat atas dengan anak *samurai* kelas yang lebih rendah.

## 2.2 Masyarakat Jepang Sebelum Perang Dunia II

Sejak tahun 1635 sampai tahun 1853 Jepang menjalankan politik *sakoku* atau politik isolasi yang akhirnya runtuh akibat masuknya kekuatan imperialisme Barat ke Jepang, yaitu dengan datangnya Komodor Perry dari Amerika yang memaksa Jepang untuk mengadakan hubungan dagang dengan pihak Barat. Sejak saat itu Jepang melangkah ke politik *kaikoku* atau membuka negara dengan melakukan hubungan dagang dengan negara Barat. Era baru itu disebut dengan *Era Meiji* yang di mulai pada tahun 1868.

Zaman Meiji terjadi dalam kurun waktu 45 tahun, yaitu 1868-1912. Awal zaman ini ditandai dengan sebuah peristiwa yang dikenal dengan sebutan *Restorasi Meiji*. Restorasi Meiji adalah pengalihan kembali kekaisaran dan berakhirnya kekuasaan ke-*shougun*-an.

Pada kenyataannya, kaisar merupakan simbol kedaulatan nasional yang tidak menjalankan pemerintahan secara nyata, tetapi sekelompok elit politiklah yang menjalankan pemerintahan tersebut. Namun demikian, kekaisaran ditetapkan sebagai pusat nasional dan otoritas politik.

Perubahan kekaisaran dari sesuatu yang tidak berfungsi pada sistem feodal menjadi sebuah ideologi dan kelembagaan yang sangat diperlukan untuk negara Jepang modern (Marius B Jansen, 2000). Restorasi Meiji disebut juga dengan *Meiji Ishin*. Revolusi atau pembaharuan adalah

rangkaian yang menyebabkan perubahan pada struktur politik dan sosial di Jepang.

Pemerintah Meiji masih menggunakan nilai-nilai nasionalisme yang ada dalam masa Tokugawa, antara lain etika *bushido*, untuk menunjukkan adanya loyalitas orang Jepang kepada kaisarnya sebagai simbol pemimpin negara keluarga Jepang yang disebut juga dengan *kazoku kokka*. Dalam kehidupan masyarakat Jepang selalu tertanam perasaan untuk membalas kemurahan budi Kaisar dan untuk itu semua warga masyarakat, khususnya kaum prajurit rela mati untuk membela Kaisarnya. Mereka harus mematuhi keputusan-keputusan pemimpin atau mereka dianggap menyalahi kewajiban. Kewajiban yang terbesar adalah keputusan anak kepada orang tua dalam *Ie* masing-masing dan dalam lingkup yang besar adalah mematuhi perintah Kaisar sebagai *honke* dalam *kazoku kokka* Jepang.

Sistem *Ie* yang terdapat dalam kehidupan masyarakat feodal dilembagakan dalam Undang-Undang Dasar Meiji untuk mengukuhkan kedudukan Kaisar sebagai pucuk pimpinan *kazoku kokka* atau negara keluarga Jepang dan menanamkan kesetiaan bangsa Jepang kepada pimpinannya.

Restorasi Meiji merupakan kembalinya nasionalisme Jepang yang sebenarnya sudah ada sejak zaman Edo. Kembalinya nasionalisme tersebut berlangsung dalam dua sisi, yaitu:

- a. Secara internal, yakni nasionalisme secara ofensif untuk menciptakan bangsa yang modern.
- b. Secara eksternal, yakni nasionalisme yang defensive untuk menandingi negara-negara maju dari Barat.

Nasionalisme Meiji menurut Craig adalah sesuai dengan slogan *sonno joi*, yaitu menghormati Kaisar, yang pada masa pemerintahan Tokugawa ditunjukkan pada bentuk kesetiaan mulai kepada pemimpin di *han*-nya masing-masing (*daimyo*) dan ini berarti mereka setia juga kepada Shogun Tokugawa sebagai pucuk pimpinan dalam Pemerintahan Pusat (dalam buku Ekayani .T. 2006)

Pemerintahan Meiji menerapkan modernisasi dengan membangun perekonomian modern sebagai tujuan nasional dan mengumandangkan slogan *fukoku kyohei* yang artinya “negara kaya militer kuat”, serta *shokusan kyogo* yaitu meningkatkan produktivitas dengan menggalakkan industrialisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintahan Meiji memilih strategi menerima kebudayaan materialisme Barat dengan cara mengimplementasikan alih teknologi dan pendidikan melalui kelembagaan modern.

Pada tahun 1898 ditetapkan Undang-Undang Dasar Meiji yang didalam salah satu pasalnya menetapkan adanya *Ie* Jepang sebagai suatu bentuk kesatuan dengan *Tenno* sebagai *honke*-nya. Didalam ketetapan tersebut dituliskan juga bahwa pengajaran pada perilaku moral dan kehidupan yang beretika dijadikan sebagai ideologi pegangan bagi bangsa Jepang. Selain itu, pemerintah menyadari perlunya ditanamkan pengetahuan dan kesadaran akan adanya pembaharuan dengan tetap menekankan pada tradisi yang sudah ada.

Sebelum Perang Dunia II semua masyarakat Jepang umumnya hidup dalam keluarga besar yang terdiri dari tiga generasi atau lebih. Hubungan keluarga diatur oleh sistem hirarki yang sangat ketat, dan orang tua sangat berkuasa. Sang ayah menuntut hormat dan kepatuhan dari anaknya, sebaliknya memberikan hal yang sama pada orang tuanya sendiri. Bagi anak wanita yang telah menikah sebaiknya diharapkan mematuhi kepada suami dan ibu-bapak mertuanya (Fukutake 1989:97).

### 2.3 Teori tentang *Ie*

Teori mengenai tentang *Ie* menurut Torigoe Hiroyuki dalam (<http://pengennyobanulisajah.blogspot.com/2010/09/dasar-konsep-ie-dalam-budaya-masyarakat.html>), *Ie* adalah dasar kehidupan orang Jepang dalam hal ini untuk beberapa tujuan, yaitu: melestarikan *myoji* (nama keluarga), melestarikan *zaisan* (warisan keluarga) dan sebagai *sosen suuhai* (pemujaan leluhur).

Sedangkan teori lainnya tentang *Ie* menurut Inoue Tetsujiro dalam (<http://pengennyobanulisajah.blogspot.com/2010/09/dasar-konsep-ie-dalam-budaya-masyarakat.html>) *Ie* harus dipahami dari ciri-ciri khasnya yaitu: ada kacho, harus ada ketaatan menghormati kacho, dan adanya kesinambungan sejarah keluarga.

Menurut Ito dalam Situmorang (2011:27), sistem *Ie* (*Ie seido*) adalah kesinambungan keluarga. Objek dari kesinambungan tersebut adalah, hubungan darah yaitu, (hubungan orang tua dengan anak, hubungan abang adik), hubungan tempat tinggal (rumah dan pekarangan), hubungan ekonomi (produksi, konsumsi, usaha dan harta). Didalam sistem *Ie* kelanjutan *Ie* lebih penting daripada kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya.

Ito juga berpendapat pelanjutan di dalam *Ie* adalah memperjelas pelanjutan hubungan leluhur dengan keturunan. Ada dua hal persyaratan dalam pelanjutan *Ie* yaitu bersifat material dan yang bersifat spiritual. Yang bersifat spritual adalah adanya pemujaan leluhur di dalam *Ie*, dan yang bersifat material adalah adanya pelanjutan harta.